

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

WARTA

SUMBER DAYA
MANUSIA INDONESIA
DI ERA DIGITAL



ISSN 2088-1975

9 772088 197569

#edisi 1. 2019

```
mirror_mod.use_y = False  
mirror_mod.use_y = True  
mirror_mod.use_z = False  
elif_operation == "MIRROR_Z":  
mirror_mod.use_x = False
```

WARTA WANTIMPRES

Warta WANTIMPRES adalah media publikasi periodik yang bertujuan untuk menyampaikan profil dan kegiatan Wantimpres kepada publik secara berkala.

Penanggung Jawab
Agus Widodo

Pimpinan Redaksi
M. Arfan Sahib Sali K.

Editor
Untung Widodo
Veri Nurhansyah T.

Penyusun
Andhi Ilham P.
Aris Munandar
B. Bonnik Manoe
D. Herdiyan
Dian Kartika Putri
Fikroh Amali F. A.
Syahlarriyadi

www.wantimpres.go.id

FOKUS



Sri Adiningsih
Ketua
Dewan Pertimbangan Presiden

"Revolusi Industri 4.0. Menciptakan Banyak Pekerjaan Baru"

PERSPEKTIF



Abdul Malik Fadjar
Anggota
Dewan Pertimbangan Presiden

"Urgensi Restrukturisasi Pendidikan Vokasi



Erna Maria Lokollo
Sekretaris Anggota
Dewan Pertimbangan Presiden

"Perlunya Kolaborasi Pemerintah dan Swasta"

DAFTAR ISI

01 FOKUS

02 PERSPEKTIF

06 GALERI KEGIATAN

Alamat Redaksi :
Jalan Veteran III No 2 Jakarta 10110
Telp.: (021) 3444801
Faks: (021) 3865092
email. veri.nurhansyah@setneg.go.id



Hak Cipta dilindungi Undang - Undang.
Dipersilahkan mengutip atau memperbanyak sebagian majalah ini dengan seizin tertulis dari penulis dan/atau penerbit.

Copyright © 2019

Foto Cover :



© Logic Monitor

FOKUS

Revolusi Industri 4.0. Menciptakan Banyak Pekerjaan Baru

Ibu Sri Adiningsih
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden

"Dari beberapa kajian, pekerjaan yang hilang akan banyak, namun yang tercipta akan lebih banyak lagi."

Dunia pada saat ini, sedang mengalami Revolusi Industri 4.0., yang ditandai dengan penetrasi penggunaan teknologi informasi hampir ke seluruh aspek kehidupan. Disruptifnya dampak yang ditimbulkan dari revolusi ini membuat banyak pihak yang memandangnya dengan pesimistik. Beberapa kalangan cemas Revolusi Industri 4.0. akan menghilangkan banyak lapangan pekerjaan sehingga dapat mendongkrak angka pengangguran. Tak sedikit pula yang khawatir peran manusia akan tereduksi dengan kian masifnya penggunaan kecerdasan artifisial.

Ibu Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres menilai, manusia Indonesia semestinya dapat memandang Revolusi Industri 4.0. dengan kacamata yang lebih optimistis. Pada satu sisi, gelombang digitalisasi dan otomatisasi yang digerakkan kecerdasan artifisial memang membuat banyak lapangan pekerjaan hilang. Jumlah karyawan di sektor retail luring misalnya, pasti akan berkurang seiring kian terbiasanya masyarakat berbelanja dari toko-toko retail daring.

Namun, di sisi lain, Revolusi Industri 4.0. juga menciptakan lapangan pekerjaan baru yang menyajikan potensi penghasilan lebih baik, tapi

Foto : Veri

dengan mekanisme kerja lebih efisien. Kehadiran Go-Jek misalnya, telah membuat jutaan orang mendapatkan penghasilan yang memadai, mulai dari ojek (Go-Ride), usaha makanan (Go-Food), hingga usaha pijat (Go-Massage).

Bermunculannya pasar-pasar elektronik seperti Tokopedia dan Bukalapak juga telah menciptakan jutaan wirausahawan baru di seluruh Indonesia. Mereka yang tadinya kesulitan memasarkan produk-produknya dapat menjangkau lebih banyak konsumen dengan membuka lapak di toko-toko retail luring tersebut. "Dari beberapa kajian, pekerjaan yang hilang akan banyak, namun yang tercipta akan lebih banyak lagi," kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM tersebut.

Peluang ini harus segera dimaksimalkan terutama untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah pusat telah berupaya penuh untuk mendorong kesiapan SDM di seluruh wilayah, misalnya dengan mengadakan program 8 juta UMKM digital, 1 juta nelayan digital, dan pelatihan coding di banyak daerah. Pemerintah daerah diharapkan mulai bergerak guna menyiapkan SDM yang siap menghadapi arus digitalisasi. Peran perguruan tinggi juga tak kalah penting guna mencetak SDM yang mampu menjawab kebutuhan industri dan perkembangan zaman (DNR, BBM, VNT)



Bapak Abdul Malik Fadjar
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

URGENSI RESTRUKTURISASI PENDIDIKAN VOKASI

“Pendidikan vokasi perlu dibenahi secara besar-besaran, tanpa mengubah bentuk institusi yang sudah ada.”

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu determinan utama yang menentukan keberhasilan sebuah negara dalam memanfaatkan peluang dari Revolusi Industri 4.0. Untuk itu, kebijakan dan strategi yang tepat sangat diperlukan guna menyiapkan SDM Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan mampu menjawab kebutuhan maupun tantangan Industri 4.0.

Bapak Abdul Malik Fadjar, Anggota Wantimpres mengatakan, para pemangku kepentingan perlu memahami dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya kreatif ke arah terwujudnya kesiapan SDM dalam menyambut era Revolusi Industri 4.0. Lebih jauh dari itu, transformasi yang terjadi di era Revolusi Industri 4.0. juga menghadirkan tantangan baru dalam hal bagaimana negara dapat memanfaatkan pranata-pranata pembinaan SDM, seperti lembaga pendidikan vokasi atau kejuruan dan pusat-pusat pelatihan yang sudah tersedia.

Jika diamat lebih jauh, Bapak Malik Fadjar menilai, memang ada ketidaksinambungan dalam pelaksanaan pendidikan vokasi di Indonesia. “Padahal, pendidikan vokasi sudah ada sejak Indonesia merdeka dan telah berjalan cukup bagus, baik yang sifatnya jangka pendek maupun jangka menengah, untuk seluruh lapisan

masyarakat,” ungkap tokoh pendidikan lintas zaman tersebut.

Pada konteks kekinian, pendidikan vokasi, kata Bapak Malik Fadjar, perlu dibenahi secara besar-besaran, tapi tanpa mengubah institusi yang sudah ada, seperti dalam bentuk SMK, politeknik, maupun Balai Latihan Kerja (BLK). Pendidikan vokasi juga sebaiknya diarahkan lebih serius menggarap konsep akademi kemasyarakatan (*community college*).

Pelaksanaan akademi kemasyarakatan ini tidak perlu dilakukan seluruhnya oleh pemerintah. Dunia usaha juga seharusnya terlibat langsung dalam menyelenggarakan akademi komunitas, sehingga mereka yang belajar di sana akan lebih mudah diserap dunia kerja. “Pemerintah hanya membuat standardisasi yang dibutuhkan,” kata Bapak Malik Fadjar. Dengan konsep ini, paradigma pendidikan masyarakat diharapkan berubah dari pendidikan untuk mendapatkan gelar, menjadi pendidikan untuk kerja.

Selain akademi kemasyarakatan, pemerintah juga perlu memperkuat peran BLK. Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa inisiasi program untuk memperkuat program BLK. Menurut Bapak Malik Fadjar, program-program penguatan BLK ini harus disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah, serta jangan dicampuri dengan kepentingan-kepentingan politik (ARD, FA, VNT).

foto : Dhika



Perlunya Kolaborasi Pemerintah dan Swasta

Erna Maria Lokollo
Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

“Proses digitalisasi pelayanan publik mesti diperkuat dengan infrastruktur pengamanan data dan jaringan”

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat masif dalam satu dekade ini telah banyak mengubah paradigma di banyak sektor, termasuk bidang pelayanan publik. Banyak negara terus mengupayakan pengembangan pelayanan publik yang lebih efisien terutama dari sisi biaya dan waktu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi. Hal ini diperlukan terutama untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi pelayanan publik oleh masyarakat.

Erna Maria Lokollo, Sekretaris Anggota Wantimpres Ibu Sri Adiningsih menyatakan, inisiatif dari pemerintah di banyak negara, termasuk Indonesia, dalam memanfaatkan teknologi informasi merupakan salah satu strategi guna menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pelayanan publik merupakan sektor paling fundamental yang harus terdigitalisasi karena menjangkau banyak sektor yang dibutuhkan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan air minum.

Proses digitalisasi pelayanan publik itu mesti diperkuat dengan infrastruktur keamanan data dan jaringan. Pasalnya, ancaman yang dihadapi setiap negara bukan lagi ancaman perang fisik, tapi

serangan siber. “Ancaman siber ini harus diantisipasi terutama masalah pengamanan data,” kata Erna.

Namun, transformasi digital di sektor pelayanan publik tentu tidak bisa dilakukan tanpa panduan dan strategi yang jelas. Menurut Erna, transformasi ini membutuhkan kolaborasi yang berkesinambungan antara pemerintah dan sektor swasta. Kolaborasi dimulai dengan menyamakan visi dan misi antara kedua belah pihak, sehingga terbangun kesepahaman yang jelas mengenai arah pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.

Tidak hanya itu, perlu juga dibentuk tim lintas fungsional yang berisikan pakar-pakar lintas sektor guna memitigasi kebutuhan masyarakat sekaligus memonitor proses digitalisasi pelayanan publik. Pada titik ini, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat dibutuhkan terutama dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM).

“Inovasi yang muncul pada sektor pelayanan publik juga seringkali membutuhkan biaya yang mahal, sehingga perlu kolaborasi dengan swasta,” ungkap Erna. Terlepas dari hal tersebut, transformasi digital di sektor pelayanan publik di Indonesia memang masih dihadapkan dengan beberapa tantangan, terutama menyangkut belum meratanya infrastruktur seperti listrik dan internet, serta keterbatasan SDM di setiap daerah (EWY, VNT).

foto : Andhi



Urgensi Ketersediaan SDM Industri 4.0.

Ignatius Untung
Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia (iDEA)

“Ketika industri 4.0. tumbuh tapi tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM, maka industrinya juga akan megap-megap.”

Revolusi Industri 4.0. menghadirkan peluang sekaligus tantangan yang sangat besar terutama bagi dunia usaha. Efek disrupsi yang sangat masif terutama akibat gelombang digitalisasi dan otomatisasi memang membuat Revolusi Industri 4.0. banyak menenggelamkan lapangan-lapangan kerja yang sudah lama eksis.

Di China, arus digitalisasi dan otomatisasi bahkan sudah merambah dunia kesehatan. Kemampuan dokter dalam menangani pasien sudah mulai diadu dengan mesin dan robot berbasis kecerdasan artifisial dan big data yang diklaim bakal lebih akurat dalam melakukan tindakan medis. “Dokter saja terancam, apalagi bidang lain,” kata Ignatius Untung, Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia (iDEA).

Tren yang ditimbulkan Revolusi Industri 4.0. mesti dipahami secara seksama, terutama pada konteks Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah memang sudah sangat terlihat mendorong pertumbuhan industri berbasis teknologi 4.0., terlihat misalnya dengan program 1.000 usaha rintisan (*start-up*). Hal ini sudah mulai terlihat hasilnya terutama dari lumayan derasnya gelombang investasi yang masuk ke usaha-usaha rintisan.

Namun, pemerintah dinilai Untung masih kurang giat mendorong ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga kerja yang berkualitas untuk menopang industri 4.0. tersebut. Transformasi kebijakan pendidikan nasional dinilai masih lambat guna memenuhi kebutuhan industri yang sangat cepat berkembang. “Ketika industri 4.0. tumbuh tapi tidak diimbangi dengan SDM-nya, maka industrinya juga akan megap-megap karena kekurangan pegawai,” ungkap Bapak Untung.

Untuk itu, Untung mengusulkan, kebijakan penyiapan SDM ini mesti dibagi menjadi tiga tahapan sesuai dengan jangka waktunya. Pertama, pada jangka pendek, calon tenaga kerja yang sudah siap kerja harus dibekali pengetahuan cukup melalui pendidikan vokasi. Kedua, pada jangka menengah, transformasi kurikulum perguruan tinggi agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Namun, penggantian kurikulum ini pun akan memakan waktu lama, sehingga pasti akan ketinggalan dengan perkembangan industri.

Ketiga, pada jangka panjang, perlu adanya kebijakan nasional sehingga masyarakat memiliki wawasan memadai mengenai profesi-profesi baru yang dihasilkan Revolusi Industri 4.0., sehingga mereka pun tertarik mendorong anak-anaknya untuk menimba ilmu dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan Industri 4.0. (EWY, VNT).

foto : dokumentasi pribadi



1



2



3



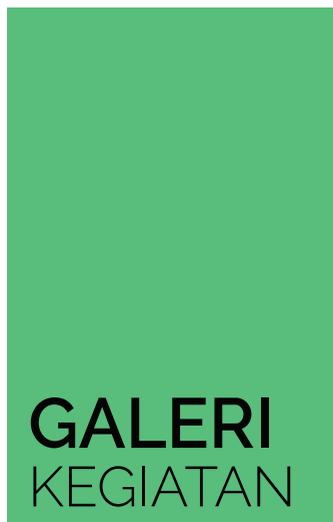
4



5



6



GALERI KEGIATAN

1. Jenderal TNI (Purn) H. Agum Gumelar, Anggota Wantimpres, berfoto bersama Panglima TNI, KSAU, dan KSAL, usai menjadi pembicara pada acara Rapat Pimpinan TNI Tahun 2019, di GOR Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap Jakarta, pada Rabu, 30 Januari 2019.
2. Bapak Sidarto Danusubroto, Anggota Wantimpres, memimpin Pertemuan Terbatas tentang "Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Bidang: Sosial, Budaya, Hukum dan Politik", di Kantor Wantimpres, Jakarta, pada Kamis, 7 Februari 2019.
3. Bapak Jan Darmadi, Anggota Wantimpres, melakukan pertemuan dengan Bapak Viktor Bungtilu Laiskodat, Gubernur Provinsi NTT, di Kantor Gubernur Provinsi NTT, Kupang, pada Rabu, 13 Februari 2019. Pertemuan tersebut mengawali kunjungan kerja Bapak Jan Darmadi beserta Tim ke Provinsi NTT.

4. Bapak Jan Darmadi, Anggota Wantimpres, melaksanakan kunjungan kerja ke kantor dan unit produksi PT Timor Otsuki Mutiara (TOM), di Kupang, Provinsi NTT, pada 13 Februari 2019. Kunjungan ke sentra produksi mutiara tersebut bertujuan untuk mengetahui potensi budidaya laut dan perlindungan investasi bidang kelautan di Provinsi NTT.
5. Bapak Jan Darmadi, Anggota Wantimpres, melaksanakan pertemuan dengan manajemen dan perwakilan nelayan, pengusaha kapal, serta tokoh masyarakat yang melakukan kegiatan usaha di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, di Kantor PPS, Kota Kendari, pada Rabu, 13 Maret 2019.
6. Ibu Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres, diterima oleh Bapak Josef Nae Soi, Wakil Gubernur Provinsi NTT, di Kantor Gubernur Provinsi NTT, pada Selasa, 19 Maret 2019.



7



8



9



10



11



12

7. Ibu Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres, mengisi buku tamu digital buatan siswa SMK Negeri 6 Kupang, di Kupang, pada Rabu, 20 Maret 2019. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja beliau ke Provinsi NTT.
8. KH. Yahya Cholil Staquf, Anggota Wantimpres, berfoto bersama dengan para narasumber dan peserta usai menggelar Diskusi Terbatas dengan tema "Islam Nusantara dalam Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia", di Kantor *Wahid Institute*, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2019.
9. Jenderal TNI (Purn) H. Agum Gumelar, Anggota Wantimpres, berfoto bersama dengan para mahasiswa STAKN Makale Tana Toraja usai menyampaikan kuliah umum dengan tema "Kepemimpinan Deliberatif yang Berwawasan Kebangsaan Dalam Masyarakat Indonesia yang Majemuk" di STAKN Makale Tana Toraja, pada Kamis, 4 April 2019.

10. Bapak Suharso Monoarfa menyampaikan kata sambutan sehubungan dengan purna tugas beliau sebagai Anggota Wantimpres, di Kantor Wantimpres, Jakarta, pada Selasa, 30 April 2019.
11. K.H. Yahya Cholil Staquf, Anggota Wantimpres, melaksanakan pertemuan dengan Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Bapak Mohammed Abdulla AlGhfeili, di Kantor Kedutaan Besar Uni Emirat Arab, Jakarta, pada Selasa, 30 April 2019.
12. Jenderal TNI (Purn) H. Agum Gumelar, Anggota Wantimpres, memberikan kuliah umum dengan tema "Pendidikan Karakter Kebangsaan" di Auditorium Aji Putri Karang Melenu Kampus Universitas Balikpapan, pada Selasa, 30 April 2019.

WARTA Edisi 1 2019

